BAB I
PENDAHULUAN

1.1. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Proyek Perubahan Strategi Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui Pengembangan Sistem Reformasi Birokrasi Internal Zona Integritas (SERAMBI ZI) di BBPPMPV BMTI merupakan suatu proyek perubahan yang bertujuan untuk membuat sistem reformasi birokrasi yang inovatif yang dapat mewujudkan Zona Integritas sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM), *impact*-nya kepada meningkatnya indeks reformasi birokrasi kemendikbud.

A. Terobosan

Terobosan/langkah strategis yang dibangun dalam proyek perubahan ini meliputi:

1. Menetapkan Agen Perubahan;
2. Membangun budaya kerja dan pola pikir melalui sosialisasi pembangunan ZI;
3. Melibatkan semua Pegawai dalam pembangunan ZI;
4. Membuat SOP yang mengacu pada proses bisnis instansi;
5. Membuat sistem kinerja dalam proses bisnis instansi dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi;
6. Membuat sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh semua pegawai;
7. Memutakhirkan secara berkala data informasi kepegawaian ;
8. Membuat inovasi pelayanan publik yang terkait dengan kediklatan;
9. Membuat Inovasi pelayanan publik terkait sistem akuntabilitas kinerja;
10. Membuat inovasi terkait integrasi sistem pelayanan internal Organisasi;
11. Membuat inovasi terkait Sistem Laporan Gratifikasi (SILAGRA);
12. Membuat inovasi terkait Lingkungan Pengendalian (INOLINGDAL);
13. Membuat inovasi terkait Penilaian Risiko atas Pelaksanaan Kebijakan (PENARI BIJAK);

14. Membuat inovasi terkait Pengendalian untuk Meminimalisir Risiko (PENDALI MINRES);
15. Membuat Aplikasi terkait Pengaduan Layanan (APEL);
16. Membuat Aplikasi terkait Whistle Blowing System (AWAS);
17. Membuat Media pembangunan ZI dalam bentuk Buku Saku;
18. Membuat Media pembangunan ZI dalam bentuk Web;
19. Membuat Media pembangunan ZI dalam bentuk Video; dan
20. Membuat Media pembangunan ZI dalam bentuk Android

B. Nilai Tambah

Proyek Perubahan Strategi Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui Pengembangan Sistem Reformasi Birokrasi Internal Zona Integritas (SERAMBI ZI) di BBPPMPV BMTI diharapkan akan memerikan nilai tambah sebagai berikut:

1. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang merata pada setiap pegawai pada unit kerja;
2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses bisnis organisasi;
3. Adanya sistem informasi kepegawaian yang memadai dalam pengelolaan SDM;
4. Adanya optimalisasi inovasi dalam pelayanan sehingga kualitas pelayanan publik meningkat; dan
5. Pengelolaan media pembangunan Zona Integritas berjalan secara efektif dan beragam.

C. Istilah-Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam Rancangan Proyek Perubahan ini pengertiannya dijelaskan sebagai berikut:

1. Zona Integritas : Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya

dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. SERAMBI ZI : Sitem Reformasi Birokrasi Zona Integritas
3. *Latens* : Stakeholder yang memiliki pengaruh tinggi namun kepentingan rendah
4. *Promotors* : Stakeholder yang memiliki pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi
5. *Apathetics* : Stakeholder yang memiliki pengaruh rendah dan kepentingan rendah
6. *Product* : produk atau hasil kegiatan
7. *Price* : harga untuk membayar produk yang ditawarkan, efisiensi dan efektif
8. *Place* : lokasi tempat kegiatan dilaksanakan
9. Promotion : promosi atau strategi marketing
10. *Customer* : pelanggan
11. S*takeholders* : pemangku kepentingan

1.2. LATAR BELAKANG

A. Gambaran Umum

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial. Dalam menyongsong 100 (seratus) tahun kemerdekaannya, Indonesia tetap memiliki cita- cita seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan mewujudkan cita-cita itu melalui Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada kualitas SDM. Dengan pembangunan SDM yang berpadanan dengan kemajuan IPTEK dan perkembangan dunia global, Indonesia akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan

cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.

Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020. Di dalam Renstra tersebut, Kemendikbud menetapkan Visi Kemendikbud 2020-2024 yaitu "Membangun rakyat Indonesia yang menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila," dan dijabarkan ke dalam 3 misi yaitu 1) Mewujudkan pendidikan berkualitas tinggi yang merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi; 2) Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; 3) Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan **reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.**

Dalam rangka mencapai visi reformasi birokrasi mewujudkan pemerintahan kelas dunia dan melanjutkan *Grand Design* dan Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2015-2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 untuk memberikan kesamaan pemahaman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif terkait perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi yang mudah dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan serta memiliki indikator untuk mengukur capaian Reformasi Birokrasi Kemendikbud.

Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bidang Mesin dan Teknik Industri merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari 7 Lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 BBPPMPV BMTI berupaya meningkatkan perbaikan indeks reformasi birokrasi di 6 (enam) area perubahan menuju zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk

mewujudkan tatakelola organisasi yang baik diperlukan reformasi birokrasi. Setiap organisasi yang ingin meraih predikat WBBM harus memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Insudtri (BBPPMPV BMTI) sebagai instansi pemerintah yang mengemban tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara memiliki andil peran yang besar dalam mewujudkan visi tersebut. Tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan mengendalikan pembangunan SDM dengan keterlibatan seluruh warga negara dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Penempatan tata kelola pemerintahan dalam pilar ke empat Visi Indonesia 2045 menunjukkan bahwa untuk mewujudkan pilar pertama visi Indonesia 2045, perlu didukung dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kurun waktu tahun 2010-2019 sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya BBPPMPV BMTI telah mengimplementasikan program nasional reformasi birokrasi.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Keberhasilan reformasi birokrasi bukan hanya pada aspek dokumentasi semata, namun pada dampak perubahan yang lebih baik dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Dampak perubahan dari reformasi birokrasi harus mampu dirasakan oleh seluruh pegawai, masyarakat, dan seluruh pihak yang terlibat (stakeholder) dalam implementasi kebijakan Kemendikbud.

B. Kondisi Saat Ini

Reformasi Birokrasi dalam Pembangunan Zona Integritas di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri (PPPPTK BMTI) sudah dilakukan sejak tahun 2016. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, PPPPTK BMTI pada tahun 2018 sudah berpredikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Tahun 2019 PPPPTK BMTI terus melakukan pembenahan pada 6 (enam) area perubahan khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan

peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2020 PPPPTK BMTI melalui Permendikbud No 26/2020 berubah nomenklatur menjadi BBPPMPV BMTI dan terus berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dengan berusaha mengusulkan untuk meningkatkan prediktanya sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) namun belum berhasil.

BBPPMPV BMTI saat ini sedang berjuang untuk meningkatkan kinerjanya sehingga menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), namun untuk mencapai predikat tersebut ada beberapa kondisi yang perlu di benahi diantaranya:

1. Kualitas tata kelola birokrasi khusunya dalam pelayanan publik pada masyarakat di BBPPMPV BMTI belum optimal;
2. Program Inovasi dalam pelayanan belum maksimal dan belum terpublikasi dengan baik kedalam media elektronik (website dan social media);
3. Sistem reformasi yang ada saat masih terpisah-pisah (belum terintegrasi) dengan baik.

Kondisi yang terjadi saat ini di BBPPMPV BMTI adalah belum meratanya perubahan *mindset* dan *culture set*, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses bisnis organisasi belum optimal, belum adanya sistem informasi kepegawaian, belum optimalnya inovasi dalam pelayanan publik, belum optimalnya inovasi dalam penguatan integritas pencegahan KKN, serta pengelolaan media pembangunan Zona Integritas belum dilakukan secara efektif. Untuk meraih predikat WBBM. Agar suatu organisasi dapat meraih predikat WBBM dapat dilakukan terobosan pada 6 (enam) area perubahan.

Strategi dalam proper ini adalah dengan melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja organisasi, memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses bisnis Instansi, membuat sistem manajemen SDM yang memadai, membuat inovasi dalam pelayanan publik, membuat inovasi dalam penguatan integritas dalam pencegahan KKN, dan mengelola media pembangunan Zona Integritas yang efektif dan beragam.

C. Kondisi yang Diharapkan

Kondisi yang diharapkan dari proyek perubahan yang dibuat adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau);

2. Terwujudnya program inovasi dalam pelayanan yang terpublikasi dengan baik dan mampu meningkatkan kinerja BBPPMPV BMTI menjadi lebih baik;
3. Terdapatnya sistem reformasi Birokrasi yang terintegrasi sehingga tata kelola pelayanan berjalan dengan efektif dan efisien.

D. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan dan perubahan karena dampaknya signifikan. Kesenjangan atau *gap* antara kondisi sekarang dengan kondisi yang diharapkan terbentuk oleh berbagai permasalahan dalam pelaksanakan reformasi birorasi seperti perubahan pola pikir dan budaya kerja di BBPPMPV BMTI belum menyeluruh terjadi untuk semua pegawai, serta belum optimalnya penataan tatalaksana, penataaan sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT UNTUK ORGANISASI ADAPTIF

A. Tujuan

Tujuan umum dari Rancangan Proyek Perubahan ini adalah untuk membuat sistem reformasi birokrasi yang inovatif yang dapat mewujudkan Zona Integritas sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM), yang *impact*-nya kepada meningkatnya indeks reformasi birokrasi kemendikbud. Sedangkan tujuan khusus dari Rencana Proyek Perubahan adalah:

1. Tujuan Jangka Pendek

   Mengembangkan Sistem Reformasi Birokrasi Zona Integritas (SERAMBI ZI) di BBPPMPV BMTI, dengan ouput:

   a. SK Agen Perubahan;
   b. Laporan Sosialisasi Pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir;
   c. Laporan Keterlibatan Semua Pegawai dalam Pembanguan ZI (membuat yel-yel, slogan /motto, banner, poster dll);
   d. SOP yang mengacu pada proses bisnis instansi;
   e. Aplikasi teknologi informasi terkait sistem kinerja organisasi;
   f. Data pemutakhiran Pegawai secara berkala;

g. Media pembangunan ZI dalam bentuk Buku, dan Web;

2. Tujuan Jangka Menengah

Terwujudnya BBPPMPV BMTI sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui pengembangan lanjutan SERAMBI ZI, dengan output:

a. Inovasi Pelayanan Publik terkait Layanan Kediklatan;
b. Inovasi Pelayanan Publik terkait SAKIP;
c. Inovasi terkait sistem pelayanan internal organisasi;
d. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang memadai;
e. Inovasi terkait Sistem Peningkatan Inetgritas dan Pencegahan KKN (Laporan Gratifikasi , Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko atas Pelaksanaan Kebijakan, Pengendalian untuk Meminimalisir Risiko, Pengaduan Layanan Masyarakat, Aplikasi terkait *Whistle Blowing System*)
f. Media pembangunan ZI dalam bentuk Video dan Android

3. Tujuan Jangka Panjang

Membangun budaya Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan di BBPPMPV BMTI Khusunya Budaya Anti Korupsi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

B. Manfaat

1. Bagi Kementerian/Lembaga

Serambi ZI dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga untuk dijadikan contoh secara nasional dalam pelaksanaan reformasi birorasi di kemendikbud.

2. Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan

Serambi ZI dapat dijadikan sarana bagi guru dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari program-program yang ada di BBPPMPV BMTI.

3. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi

Serambi ZI dapat dijadikan sarana bagi dinas pendidikan provinsi dalam hal koordinasi dan memperoleh informasi melalui pemanfaat teknologi maupun media sosial sehingga proses kerjasama bisa lebih cepat dan efisisen.

4. Bagi Pegawai BBPPMPV BMTI

Serambi ZI dapat dijadikan sarana bagi pegawai BBPPMPV BMTI dalam memahami dan menginternalisasi program reformasi birokrasi dalam pembangunan zona integritas sehingga pola pikir dan budaya kerja bisa terbangun dengan baik.

1.4. OUTPUT DAN OUTCOME

A. Output

Output dari Proyek Perubahan ini adalah:

1) SK Agen Perubahan;
2) Laporan Sosialisasi Pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir;
3) Laporan Keterlibatan Semua Pegawai dalam Pembanguan ZI (membuat yel-yel, mars WBBM BMTI, Jingle WBBM BMTI,slogan /motto, banner, poster dll);
4) SOP yang mengacu pada proses bisnis instansi;
5) Aplikasi teknologi informasi terkait sistem kinerja organisasi;
6) Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
7) Data pemutakhiran Pegawai secara berkala;
8) Inovasi Pelayanan Publik terkait Layanan Kediklatan;
9) Inovasi Pelayanan Publik terkait SAKIP;
10) Inovasi terkait sistem pelayanan internal organisasi;
11) Inovasi terkait Sistem Laporan Gratifikasi;
12) Inovasi terkait Lingkungan Pengendalian;
13) Inovasi terkait Penilaian Risiko atas Pelaksanaan Kebijakan;
14) Inovasi terkait Pengendalian untuk Meminimalisir Risiko;
15) Aplikasi terkait Pengaduan Layanan Masyarakat;
16) Aplikasi terkait Whistle Blowing System;
17) Media pembangunan ZI dalam bentuk Buku Saku;
18) Media pembangunan ZI dalam bentuk Web;
19) Media pembangunan ZI dalam bentuk Video;
20) Media pembangunan ZI dalam bentuk Android.

B. Outcome

Outcome dari Proyek Perubahan ini adalah:

1) Terciptanya layanan prima di BBPPMPV BMTI;
2) Terciptanya BBPPMPV BMTI sebagai organisasi yang Bersih dari Korupsi, Melayani, Taat, dan menjunjung tinggi Integritas;
3) Menjadi role model bagi institusi lain dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
4) Meningkatnya Indeks reformasi Birokrasi di Kemendikbud.